

**NO. 1404/MD-D/SD-SI/2013**

**UPAYA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
PROVINSI RIAU DALAM MENGATASI  
PERBEDAAN PAHAM KEAGAMAAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)  
Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



**OLEH :**

**HERMAWAN  
NIM.10945005634**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
R I A U  
2 0 1 3**

## **ABSTRAK**

### **Penelitian ini berjudul “ UPAYA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI RIAU (MUI) DALAM MENGATASI PERBEDAAN PERBEDAAN PAHAM KEAGAMAAN”**

Fenomena di masyarakat pada saat ini adalah sering terjadinya kontra yang disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang berbeda dalam memahami qur'an dan hadist rasul, dan ditambah lagi dengan kurangnya Ilmu Agama yang cukup untuk bisa memahami ajaran Agama Islam dengan baik, pemicu terjadinya konflik di masyarakat adalah kurangnya rasa toleran dan saling menghargai pendapat dari kelompok atau golongan yang memiliki paham berbeda. Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi yang bersifat keagamaan dan bersifat independen yang dinaungi oleh pemerintah, karena Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekian muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang Ukhuwah Islamiyah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam Mengatasi Perbedaan Paham keagamaan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Upaya Majelis Ulama Indonesia dalam mengatasi perbedaan paham keagamaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam Mengatasi Masalah Perbedaan Paham Keagamaan. Penelitian ini menggunakan analisis diskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam mengatasi perbedaan paham keagamaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam mengatasi perbedaan paham keagamaan, Majelis Ulama Indonesia memiliki program yang jelas dan telah berjalan dengan baik, dengan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk berdiskusi, berdialog secara langsung dengan masyarakat, mengadakan forum silaturahmi dengan para mubalig, ustadz, kiyai, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh ormas Islam, menggunakan buku atau majalah sebagai alat bantu komunikasi, bermitra dengan masyarakat, menerima laporan tentang munculnya kelompok yang meresahkan masyarakat, dan Majelis Ulama Indonesia melakukan pengawasan terhadap pengajian-pengajian yang ada, serta melaporkan kepada pihak yang berwajib bila memang terdapat kelompok tertentu yang telah menyimpang dari syari'at Islam.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa penulis persembahkan kehadiran Allah SWT. Atas rahmat taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau dalam Mengatasi Perbedaan Paham Keagamaan”*. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing umatnya kearah yang benar. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Nazir Karim, MA, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Amril Mansur, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Toni Hartono, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah.

4. Bapak Imron Rosidi, S.Pd., MA selaku Sekretaris Jurusan manajemen Dakwah.
5. Bapak Drs H. Zasri M. Ali MM, dan Drs Syahril Romli M.Ag selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
6. Seluruh Bapak-Ibu Dosen, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yang telah memberikan ilmu, mengajarkan, membimbing penulis selama mengenyam dibangku perkuliahan. Dan juga karyawan/I Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau yang telah memberi pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administarsi.
7. Bapak Staf Tata Usaha pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Yang teristimewa buat kedua orangtuaku Ayahanda dan ibunda tercinta (Suheri dan Alawiyah) sebagai sosok pahlawan dalam hidup penulis yang telah berjuang dengan penuh pengorbanan untuk membesarkan serta mendidik penulis, sehingga saatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh sahabat-sahabatku tercinta, Ahmad Rianto, M. Ikhwan, Riska Abdullah, Ira Maya Sofiana, M. Adi Wahyudi, Siti Fatimah, Iis Ardila, Eli Suwanti, Khoiri Salam, M. Nurhadi Saputra, Mafari Afrizal, Agus Prabowo, Farida Hanom, Tri Utami, Pipir Romadi, Jasnimar, Riyo, Riyan Randa, Mudiayanti, M. Hambali, M. Zainal Arifin terimakasih banyak dukungan dan motivasinya.

Semoga semua bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak memiliki kekurangan baik dari segi teknis maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan masukan dari berbagai pihak sangatlah diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

Pekanbaru, Maret 2013

Penulis,

**HERMAWAN**  
**NIM. 10945005634**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	3
C. Penegasan Istilah.....	4
D. Permasalahan.....	5
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitain.....	6
F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional.....	6
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sestematika Penulisan.....	25

### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau.....	27
B. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau.....	34
C. Orientasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau.....	34
D. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau.....	37
E. Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau.....	38
F. Program Kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau.....	41

### **BAB III PENYAJIAN DATA**

A. Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau dalam Mengatasi Perbedaan Paham Keagamaan.....	48
B. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.....	55

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau dalam Mengatasi Perbedaan Paham Keagamaan.....	57
B. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN.....65**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring pesatnya perkembangan iptek, tidak bisa di pungkiri bahwa hal ini memberi peluang yang besar terhadap perkembangan Dakwah Islam. Kemajuan di bidang media baik media cetak maupun elektronik membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kemajuan Dakwah Islam. Masyarakat dengan mudah mendapat informasi dalam segala aspek kehidupan. Secara tidak langsung tentu informasi tersebut mempengaruhi pola dan tingkah laku masyarakat.

Dalam kehidupan beragama, masyarakat dihadapkan kepada fenomena-fenomena kontemporer, berbagai kasus muncul dan memerlukan pemikiran yang mendalam dalam menangani kasus tersebut. Permasalahan yang muncul di masyarakat seringkali membuat masyarakat bingung.

Dalam hukum Islam jika satu permasalahan itu sudah ada dalil yang Qoth'i dalam Al-Qura'an maka tidak di butuhkan lagi adanya perdebatan, namun jika dalilnya masih Dzonni maka di tempuh jalan ijma' untuk menemukan hukum dengan permasalahan tersebut.

Kenyataan saat ini banyak terjadi perbedaan paham dalam masyarakat. Perbedaan paham ini muncul karena ketidak pahaman masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi. Adanya perbedaan yang kontradiktif di kalangan masyarakat khususnya kaum muslimin, dan bahwa kebenaran itu hanya satu terletak pada pendapat salah seorang yang berijtihad, sedangkan pihak yang



bertentangan dengannya di anggap keliru, terletak pada pokok dan cabang, pada aqidah dan amalan, pada perkara-perkara teoritis maupun praktis, itulah yang di terangkan oleh Al-Kitab, sunnah dan ijma' para sahabat serta di sepakati oleh imam di bidang pengetahuan. ('Azhim, 2007: 278)

Salah satu contoh peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat yang berakibat perbedaan paham dan kurangnya pemahaman ilmu agama, peristiwa ini terjadi ketika umat Islam sedang melangsungkan ibadah salat jum'at di majid kompleks perumahan, ketika khatib sedang berada di atas mimbar sedang berkhotbah, namun tiba-tiba saja ada salah seorang jama'ah yang berdiri secara seponatan ketika mendengar khatib membacakan sahlawat dengan menggunakan kalimat sayyidina yang mereka anggap itu adalah merupakan perbuatan bid'ah.

Sikap toleran adalah mengakui adanya realitas perbedaan. Untuk menegakkan budaya "bersaudara dalam perbedaan" rasa paling benar sendiri harus di hindari, sikap saling mengkafirkan karena adanya perbedaan dalam memahami prinsip-prinsip Agama juga harus di jauhi. (Dokumentasi Kongres Umat Islam Indonesia IV, 2005: 106)

Salah satu Organisasi dan lembaga dakwah seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai peran dalam menyelesaikan masalah ini, dan mengupayakan agar masalah ini tidak menjadi masalah yang serius dalam masyarakat, karena hal ini mampu menimbulkan konflik dan keresahan pada masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran khusus dalam memberi pencerahan terhadap masyarakat. Untuk menjalankan fungsi dari MUI tersebut

maka komisi Ukhuwah Islamiyah adalah komisi yang berperan dalam membangun kerukunan umat dan memberikan pemahaman terhadap umat agar tidak terjadi konflik di lingkungan masyarakat yang berkenaan dengan masalah paham keagamaan yang mereka anut.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau Dalam Mengatasi Perbedaan Paham Keagamaan”**

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dan alasan bagi penulis untuk meneliti judul ini adalah:

1. Masalah ini sangat menarik untuk diteliti, karena masalah ini menyangkut upaya pemecahan masalah umat atau masyarakat yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, di mana judul ini sangat sesuai dengan jurusan penulis, yaitu Manajemen Dakwah (MD) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
2. Adanya keinginan yang kuat untuk memahami secara jelas tentang upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau dalam mengatasi perbedaan paham keagamaan.
3. Judul ini penulis angkat atas pertimbangan dan kemampuan penulis sendiri, karena terjangkau oleh penulis baik dari waktu, tempat dan biaya (sarana dan prasarana).

### **C. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, maka di pandang sangat penting buat penulis untuk memberikan pengertian dari pada istilah-istilah berikut:

1. Upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. (Muhaimin, 2007: 1250).
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi yang menghimpun para ulama, zuama' dan cendekiawan muslim yang bertujuan menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan islam yang dinamis dan efektif, sehingga mampu mengarahakan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah islamiayah, membimbing umat dan menjalankan ibadat, mengembangkan umat dalam mengembangkan muamalat, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang di ridhai Allah SWT. (Rasyid, 2007: 43)
3. Paham keagamaan adalah kepercayaan mengenai masalah usul (pokok) dan furu' (cabang) dalam Agama. (Abbas, 2008: 2)

### **D. Permasalahan**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau dalam mengatasi masalah perbedaan paham keagamaan?

- b. Apa saja usaha yang di lakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau dalam mengantisipasi terjadinya masalah perbedaan paham keagamaan?
- c. Apa faktor yang mempengaruhi terlaksananya Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau dalam mengatasi masalah perbedaan paham keagamaan?
- d. Apa faktor yang menjadi kendala pengurus Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau dalam mengatasi masalah paham keagamaan?

## **2. Batasan Masalah**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam permasalahan penelitian ini maka penulis memberikan batasan masalah pada **“Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam Mengatasi Perbedaan Paham Keagamaan”**.

## **3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Privinsi Riau dalam Mengatasi Masalah Perbedaan Paham keagamaan?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang di lakukan mempunyai tujuan yang akan di capai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

Untuk mengetahui Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau dalam Mengatasi Masalah Perbedaan Paham Keagamaan.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian dapat di kemukakan sebagai berikut:

- a. Sebagai wahana untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam membuat suatu karya ilmiah.
- b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau dalam Mengatasi Masalah Perbedaan paham Keagamaan.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti permasalahan yang sama.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi yang menghimpun para ulama, zuama' dan cendekiawan muslim yang bertujuan menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan islam yang dinamis dan efektif, sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah islamiyah, membimbing umat dan menjalankan ibadah, mengembangkan umat dalam mengembangkan muamalat, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang di ridhai Allah SWT. (Rasyid, 2007: 43)

#### **1. Peran Majelis Ulama Indonesia**

Berdasarkan jati diri ulama sebagai *waratsatul al-anbiya* maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran sebagai berikut:

a. Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (*waratsatul al-anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijak serta berdasarkan Islam.

b. Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, baik di minta maupun tidak di minta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaan.

c. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ra'ya wa Khadim al ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa Agama.

d. Sebagai Penegak *Amar Makruf* dan *Nahyi Munkar*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah.

e. Sebagai Pelopor Gerakan *Tajdid*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *tajdid* yaitu gerakan pemurnian (*tashfiyah*) dan dinamisasi (*tathwir*) pemikiran Islam.

f. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (*ashlah al ummah*)

1. Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apabila perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *al-jam'u wat taufiq* (kompromi dan persesuaian) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat)
2. Sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) dengan cara:
  - a. Membina dan memelihara kehidupan umat (*himayah al-ummah*), terutama dalam aqidah, syariah dan ahlak.
  - b. Penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (*taqwiyyah al-ummah*)
  - c. Berusaha terus menerus menyatukan umat (*tauhid al-ummah*)

g. Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*qiyadah al-ummah*)

MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggung jawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (*syirkatu al-Mas'uliyah*) terutama dalam hal:

1. terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama.
2. perbaikan akhlak bangsa dan
3. pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan. Maka MUI perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat (*qiyadah al-ummah*) secara kelembagaan. (Hasil Rakernas Majelis Ulama Indonesia, 2011: 10)

Di dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat salah satu komisi yang khusus atau memiliki bidang yang tersendiri yaitu mengurus permasalahan

tentang umat, yang berkaitan dengan Ukhuwah Islamiyah. Komisi Ukhuwah Islamiyah adalah perangkat organisasi MUI yang bertugas memasyarakatkan pemahaman dan pengamalan konsep Ukhuwah Islamiyah yang meliputi Ukhuwah basyariah, Ukhuwah wathaniyah secara utuh , kongkrit, realistis menuju terciptanya masyarakat yang marhamah. (Sam, 2010: 146)

#### 1. Urgensi Ukhuwah Islamiyah

Ukhuwah Islamiyah adalah ikatan persaudaraan sesama muslim. Sebagai Agama terakhir yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam memberi banyak petunjuk dalam hal ikatan Ukhuwah Islamiyah. Ikatan persaudaraan sesama muslim telah di ajarkan oleh al-qur'an dan hadis sebagai sumber Agama Islam, ajaran ukhuwah dan persatuan Islam sangat banyak, baik dalam ajaran normatif maupun dalam praktik kehidupan Rasulullah SAW.

Ada beberapa metode dan langkah yang di kembangkan Nabi dalam dakwahnya untuk mewujudkan kesatuan umat atau Ukhuwah islamiyah:

*Pertama*, kebersamaan. Islam meletakkan aqidah sebagai asas dasar kebersamaan. Faktor ras, suku, warna kulit, bahasa, perbedaan tingkat ekonomi, budaya atau kepentingan lainnya( khilafiyah) menjadi satu komplemen kebersamaan tersebut. Dalam kebersamaan itu pula tumbuh Ukhuwah Islamiyah yang memungkinkan terciptanya kebersamaan umat Islam, yakni berbaik sangka dengan umat Islam lainnya, tidak ada curiga mencurigai, dan bermusuhan.

*Kedua*, kepemimpinan. Rasulullah dalam hadisnya menegaskan peranan kepemimpinan setiap orang pada level dan bidang masing-masing. Hal ini sangat logis karena dalam Islam konsep kepemimpinan bukanlah hanya tanggung jawab



masing-masing sesuai dengan diri mereka sendiri di mana mereka berkecimpung. Dalam Al-quran pun ditegaskan bahwa kedudukan seseorang di hadapan Allah SWT di tentukan oleh rasa tanggun jawab atas kewajiban-kewajiban yang diemban oleh masing-masing pribadi sebagai manifestasi ketakwaan umat terhadap Sang Pencipta Alam Semesta dan “kepemimpinan” merupakan konsekwensi logis dari kehidupan manusia di dunia ini. (Amin, 2009: 218)

a. Konsep Al-quran tentang Ukhuwah

Dasar konsep Ukhuwah yang di tawarkan oleh Alquran dalam segala tingkatan sosialnya mulai dari hubungan perorangan sampai kehubungan perorangan samapai ke hubungan antar bangsa yang merujuk kepada sumber moral

Di dalam konsep Ukhuwan ini, tercakup di dalamnya ajaran-ajaran berbakti kepada kedua orangtua (*birr al-walidayn*), mengikat tali persaudaraan (*shilaturrahmi*), mempertemukan perselisihan (*islah dzat al-bain*), hak-hak sesama muslim (*huquq al-islam*), hak-hak kerabat yang dekat (*huquq dazwil qubra*), hak-hak kerabat (*huquq dzawil arham*), hak-hak bertetangga (*huquq al-jihar*), nasihat-nasihat karena Allah, Rasul, dan karena pemimpin dan umatnya (*an-nashihah lillah wa li rasul wa li aimmatil muslimin wa aimmitihim*), ajaran *hisbah*, ajaran berorganisasi (*jamaah*), dan ajaran *ummah*. Komponen-komponen dari ukhuwah Islamiyah ini merupakan rangkaian kesatuan. (Amin, 2009: 218)

b. Konsep-konsep dasar Ukhuwah Islamiyah

Di samping konsep dasar dari Alquran, para ulama mengenal tiga konsep untuk memantapkan perbedaan pemahaman dan pengamalan ajaran Agama.

1. *Konsep al-mukhti'u al-'ibadah* (keragaman cara beribadah).

Konsep ini mengakui adanya keragaman yang di praktikan Nabi dalam bidang pengamalan agama, mengantarkan kepada pengakuan akan kebenaran semua praktik keagamaan, selama semua itu merujuk kepada Rasulullah SAW.

2. *Konsep al-mukhti'u fi al-ijtihad lahu ajrun* (yang salah dalam berijtihad pun mendapat pahala).

Ini berarti selama orang mengikuti pendapat seorang ulama, ia tidak akan berdosa, bahkan tetap diberi ganjaran oleh Allah SWT, meskipun hasil ijtihad yang di amalkannya keliru. Hanya saja penentuan besar dan salah bukan wewenang mkhluk, tetapi wewenang Allah yang akan diketahui pada hari kiamat nanti.

3. *Konsep la hukma lillah qabla ijtihad al-mujtahid* (Allah belum menentukan suatu hukum sebelum upaya ijtihad di lakukan oleh seorang mujtahid).

Ini berarti bahwa hasil ijtihad itulah yang merupoakan hukum Allah bagi masing-masing mujtahid, walaupun hasil ijtihadnya berbeda-beda.

c. Pengaruh Ukhuwah Islamiyah bagi Umat Islam dan perbedaan paham

Ketika seorang islam dengan keimanannya dapat menangkis pengelompokan, sikap fanatisme, dan sukuisme, ketika cakrawala pandangannya menjadi luas, keimanannya dapat mendorong dan membangkitkan jiwanya, maka dia harus berusaha mempersatukan umat Islam semampu mungkin. Ia juga harus berupaya merealisasikannya dengan berkorban dan benar-benar menyadari bahwa sesungguhnya mempersatukan Islam merupakan kewajiban yang paling penting.

Dalam hal ini, Syaikh ibn Baz mengatakan,” Merupakan hal yang telah di maklumi, bahwasannya urusan setiap hamba tidak akan sempurna, kemaslahatan mereka tidak terorganisir, ide-ide mereka tidak akan padu, dan musuh-musuh mereka akan selalu menteror, kecuali mereka mampu mengusung rasa solidaritas Islam, yang inti ajarannya adalah saling tolong menolong dalam kebaikan, ketakwaan, kesempurnaan, kemenangan, kasih sayang, saling berwasiat dengan kebenaran dan sabar terhadap kebenaran tersebut. (‘Azhim, 2005: 11)

Pengaruh yang ditimbulkannya dari Ukhuwah Islamiyah dalam sosial masyarakat adalah tercermin dari beberapa hal, yaitu:

1. Toleran (*Tasamuh*)

Salah satu prinsip dari Ukhuwah adalah mengakui adanya realitas perbedaan, untuk menegakkan budaya “bersaudara dalam perbedaan”, rasa saling benar sendiri harus di hindari, sikap saling mengkafirkan lantaran perbedaan dalam memahami prinsip-prinsip Agama juga harus di jauhi.

2. Gotong royong (*Ta’awun*)

Ta’awun yang bersifat positif dan aktif akan melahirkan kompetisi (*istibaq*) dalam berkarya dan berkreatifitas. Perbedaan yang terjadi di masing-masing kelompok masyarakat Islam dan ormas akan memperkaya dan saling melengkapi dan bukan saling menafikan.

3. Solidaritas sosial (*Takaful Ijtima’i*)

Islam menegaskan komitmennya pada advokasi-advokasi terhadap siapa saja yang di perlakukan tidak adil dan terhadap mereka yang lemah dan di lemahkan serta menghapuskan ketidak adilan dan penindasan terhadap siapa saja,

oleh karna itu denagan adanya ukhuwah yang kuat, maka akan ada rasa saling mengutakan di antara sesama.

#### 4. Cinta kasih (*Mahabbah*)

Semangat cinta kasih, salaing berbagi, saling melindungi dan saling menaungi merupakan cermin dari sikap persaudaraan (ukhuwah) sejati. Mahabbah memiliki sikap hati yang bersifat esoteris yang dengannya mampu melahirkan rasa empati dan solidaritas sosial. (Dokumentasi Kongres Umat Islam Indonesia IV, 2005: 106)

#### **b. Upaya**

Upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. (Muhaimin, 2007: 1250). Persoalan ataun masalah yang sering terjadi dalam masyarakat yang heterogen biasanya memiliki banyak perbedaan pendapat, pandangan dan cara berfikir. Dan di antaranya adalah dalam kepercayaan atau paham keagamaan. (Abbas, 2008: 2)

Adapun pengertian upaya dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang di lakukan untuk menanggulangi ataupun untuk mencegah terjadinya konflik dan kesenjangan sosial di antara masyarakat karna adanya perbedaan paham keagamaan yang mereka anut, dan hal ini di lakukan dengan meningkatkan rasa Ukhuwah Islamiyah antara sesama umat islam itu sendiri.

Menurut Samsul Amin dalam bukunya Ilmu Dakwah mengatakan bahwa Upaya yang bisa dilakukan untuk membangun ikatan ukhuwah Islamiyah dan mengatasi masalah perbedaan paham khususnya di Indonesia mempunyai langkah-langkah yang dapat di lakukan antara lain sebagai berikaut.

1. Refungsionalisasi organisasi, baik formal maupun nonformal sebagai alat perjuangan.
2. Pembinaan sikap integrasionis-inklusif antar jamaah, dan integrasionis-kreatif yang di dasari sifat mandiri dalam hubungan antara golongan dalam masyarakat.
3. Mengembangkan kesamaan persepsi antar jamaah dalam rangka pembinaan ukhuwah, dengan menemukan *kalimatun sawa*.
4. Mengembangkan sikap partisipatis dalam organisasi “lintas profesi” dan mengembangkan model-model koordinasi dan pembinaan ikatan jamaah nonformal.
5. Mengembangkan kembali lembaga pesantren sebagai wahana ikatan umat, antara lain dengan menyuburkan pengkaderan kepemimpinan dengan sistem asistensi kiai, pengembangan proyek-proyek sosial (*community development*) dan mengarahkan sifat hubungan antar pesantren atas dasar keturunan (*family relationship*) menjadi hubungan ide.

Benang-benang ukhuwah Islamiyah antara elemen dan golongan umat Islam harus di rajut dengan menjalankan aktifitas-aktifitas keagamaan seperti dakwah, seminar, mengadakan pertemuan antar golongan atau kelompok organisasi ataupun non organisasi atau lembaga. Dengan demikian membina persaudaraan di antara umat islam akan dapat terealisasi. Jika ada perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) maka itu adalah suatu keniscayaan, akan tetapi perbedaan tersebut mesti di cari titik temunya. Sehingga perbedaan pendapat akan menjadi rahmat, bukan menjadi perpecahan di kalangan umat. (Munir, 2009: 220)

### **c. Perbedaan Paham Keagamaan**

#### **1. Paham keagamaan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Paham berarti pengertian, pendapat, pikiran, aliran, haluan, dan pandangan (kesektean semangat atau kecendrungan ke arah pengembangan sekte tertentu dalam agama). (Muhaimin, 2001: 811)

Dan Agama berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Keagamaan berarti yang berhubungan dengan Agama. (Muaimin, 2001: 12)

Paham keagamaan adalah suatu pendapat, pikiran dan aliran yang berhubungan dengan kepercayaan dalam agama atau dalam ajaran Islam sering juga disebut dengan I'tiqad atau kepercayaan. Dalam memahami soal-soal paham keagamaan dalam Islam lebih baik terlebih dahulu di maklumi istilah-istilah yang terpakai di lingkungan ini.

Ushuluddin artinya Pokok Agama.

Ilmu Ushuluddin artinya Ilmu Pokok-pokok Agama.

Di dalam Ilmu Ushuluddin di bicarakan soal-soal I'tiqad yang menjadi pokok bagi Agama, yaitu:

- a. Kepercayaan (I'tiqad) yang bertalian dengan ketuhanan (*Ilahiyat*).
- b. Kepercayaan yang bertalian dengan Kenabian (*Nubuwaat*)

- c. Kepercayaan yang bertalian dengan soal-soal yang gaib (hari akhirat, syurga, neraka, dan lain-lain)
- d. Dan lain-lain soal Kepercayaan.

Ilmu Ushuluddin kadang-kadang dinamai Ilmu Kalam, yakni Kalam Tuhan karena dalam Ilmu ini banyak dibicarakan sifat-sifat Tuhan, di antaranya sifat Kalam (berkata).

Ulama-ulama dan ahli-ahli Ilmu Kalam dinamai Mutakallimuun atau Mutakallimiin.

Ada juga orang menamai Ilmu ini dengan Ilmu Tauhid, yakni Ilmu ke-Esaan Tuhan karena yang banyak di bicarakan dalam Ilmu ini iyalah tentang ke-Esaan Tuhan. Ada juga yang menamainya dengan Ilmu ‘Aqaid, yaitu Ilmu I’tiqad karena yang banyak di bicarakan dalam Ilmu ini adalah soal-soal I’tiqad (kepercayaan). Di Indonesia ada orang-orang menamainya dengan Ilmu *sifat dua puluh*, karena di dalam ilmu ini di bicarakan 20 sifat yang wajib (mesti ada) bagi Tuhan. Pendeknya perkataan-perkataan Ilmu Ushuluddin, Ilmu Kalam, Ilmu Tahuid, Ilmu ‘Aqaid, Ilmu sifat dua pulauh, sama artinya yaitu Ilmu yang di bicarakan di dalamnya soal-soal I’tiqad (kepercayaan tentang Ketuhanan, Kenabiayan, Keakhiratan).

Kalau kita berbicara tentang usul (pokok) sudah tentu ada yang furu’ (cabang). Dalam istilah keagamaan, furu’ syari’at berarti soal-soal ibadat yang di kerjakan setiap hari, umpamanya salat, puasa, zakat, haji, nikah, jual beli dan lain-lain. Kesimpulannya dapat di tegaskan bahwa ushuluddin ialah I’tiqad-i’tiqad dan furu’ syari’at ibadat-ibadat yang lahir. (Abbas, 2008: 2)

## **2. Sebab-sebab perbedaan paham**

Sebuah paham berawal dari pemahaman seorang ulama mujtahid yang biasanya disebut dengan imam madzhab. Istilah ‘madzhab’ bermakna ‘aliran fiqh’. Berikut ini adalah sejumlah faktor yang menyebabkan timbulnya berbagai madzhab fiqh.

### **a. Perbedaan dalam hal dalil syara’ yang di gunakan**

#### **1. Perbedaan penilaian terhadap assunah**

Seorang mujtahid bisa menganggap sebuah hadis shahih, sedangkan yang lain menganggap tidak shahih. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kriteria untuk menilai kesahihan suatu hadis.

Misalnya hadis-hadis tentang zakat atas perhiasan yang dikenakan perempuan, menyatakan bahwa seorang perempuan bersama anak perempuannya datang kepada Rasulullah SAW. perempuan tersebut mengenakan dua gelang emas di tangannya. Lalu Rasulullah saw bertanya apakah dia sudah membayar zakat atas perhiasan tersebut. Maka perempuan itu menjawab, “belum.” Kemudian Rasulullah bertanya. “apakah engkau ingin Allah mengenakan gelang-gelang api di kedua tanganmu?” hadis ini diriwayatkan oleh ‘Amr bin Syaib.

Sebagian ulama menganggap hadis ini shahih, sedangkan sebagian yang lain menganggapnya lemah, karena sanad hadis tersebut lemah. Selain itu, seorang mujtahid boleh jadi mengetahui adanya suatu hadis, sedangkan mujtahid yang lain tidak mengetahui. Karena alasan inilah seorang mujtahid selalu berpesan kepada murid-muridnya, “apa bila kalian mendapati setelah pergi dariku,



dan hadis tersebut bertentangan dengan apa yang telah aku sampaikan kepadamu, maka singkirkanlah pendapatku dan ikuti hadis tersebut.

## 2. Perbedaan pendapat di kalangan sahabat

Sebagian ulama menjadikan pendapat salah seorang sahabat sebagai salah satu dalail syara', sementara sebagian ulama yang lain menganggap para sahabat sebagai mujtahid yang pendapatnya (secara pribadi) tidak mengikat.

## 3. Perbedaan dalam melakukan qiyas

Sebagian ulama mempraktekkan qiyas, sedangkan sebagian yang lain mempraktikan istihsan.

## 4. Perbedaan konsep ijma'

Ada sebagian ulama yang hanya menerima ijma' shahabat, namun ada pula yang menerima ijma' penduduk madinah, ijma' mujtahidin, ijma' ahlul bait, dan berbagai konsep ijma' lainnya.

## 5. Perbedaan penerimaan sumber hukum lainnya

Ada kalangan ulama yang menggunakan konsep *mashalih al-mursalah*, sementara kalangan yang lain tidak menerima. Hal-hal seperti ini ikut berperan dalam memunculkan perbedaan pendapat di antara para ulama. (Hilal, 2007: 90)

## b. Perbedaan dalam menafsirkan nash

### 1. Literalis

Ada sebagian kalangan ulama yang mengambil pengertian atau makna literal dari suatu nash. Dengan kata lain, mereka memahami nash berdasarkan makna yang tersurat di dalam nash, dan tidak mau berusaha menggali makna yang

lebih dalam dari nash tersebut. Sebagian dari kalangan ini di sebut sebagai kaum zhahiri, yaitu orang-orang yang hanya mengambil makna zahir dari suatu nash.

## 2. Orang-orang yang mempelajari makna tersembunyi dari suatu nash.

Selain memahami yang tersurat, sebagian ulama juga mempelajari makna-makna yang lebih dalam atau yang tersembunyi di dalam nash. (Hilal, 2007: 91)

### c. Perbedaan metodologi ushul fiqh

Ada pula perbedaan dalam memahami bentuk dan jenis-jenis seruan. Sebagai contoh adalah hadis tentang memelihara janggut. Ada perbedaan pendapat diantara ulama tentang seruan yang terkandung dalam hadis tersebut apakah menunjukkan suatu kewajiban, mandub, atau kemubahan.

### d. Perbedaan dalam memahami teks berbahasa arab

Perbedaan pendapat bisa juga terjadi karena adanya perbedaan pemahaman teks-teks berbahasa arab yang menunjukkan lebih dari satu makna. Sebagai contohnya, Allah SWT. berfirman yang artinya



*“wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.* (Departemen Agama RI, 2009: 36)

Secara bahasa, quru’ dapat berarti rentang waktu dari permulaan masa haid, namun dapat pula berarti permulaan masa suci. Perbedaan waktu antara tiga kali quru’ dengan pengertian awal masa haid dengan tiga kali quru’ dengan pengertian awal masa suci adalah antara 7 sampai dengan 15 hari.

Sebagian ulama berpendapat bahwa quru’ berawal masa suci, karena ada suatu hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. memerintahkan seseorang

perempuan menunggu masa suci, sedangkan ulama lain menganggap hadis tersebut tidak shahih, sehingga mereka berpendapat bahwa quru' dalam al-Qur'an itu bermakna awal masa haid. (Hilal, 2007: 92)

Tidak seorangpun yang diperbolehkan menganggap *kufur* ( tidak islami) suatu pendapat hanya semata-mata karena berada dengan pendapat yang dia anut. Sebaliknya, setiap umat Islam harus menghargai dan menghormati pendapat yang lain sepanjang pendapat tersebut berdasarkan dalil-dalil syara' yang absyah.

Pandangan terhadap pendapat-pendapat islami lainnya ini akan menghasilkan sikap yang tepat terhadap kaum muslimin yang menganut pendapat yang berbeda. Meskipun demikian langkah-langkah seperti ini tidak cukup efektif untuk menyelesaikan persoalan yang di haapai kaum muslimin saat ini, yaitu tidak adanya kesatuan pendapat kaum muslimi pada beberapa perkara pokok. Ada begitu banyak pendapat yang berkembang di tengah-tengah umat. Dalam banyak kasus adanya perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi persoalan.

Adanya perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha tidak semestinya dilihat sebagai suatu kelemahan atau pemicu keterpecah belahan. Terakhir, cara untuk menyatukan pendapat kaum muslimin bukanlah dengan menindas pendapat-pendapat yang berbeda, dengan menyerukan penghapusan berbagai madzhab. Akan tetapi kesatuan pendapat di kalangan kaum muslimin dapat di raih dengan jalan hidup di bawah naungan sebuah kepemimpinan islam bersifat ideologis, di mana khalifah memiliki otoritas menentukan pendapat mana yang akan diadopsi dalam perkara-perkara kunci. (Hilal, 2007: 97)

### **3. Fenomena yang terjadi di masyarakat**

Dalam kehidupan bermasyarakat maka banyak di jumpai penomena yang terjadi dan permasalahan yang muncul, dan persoalan yang muncul juga tidak terlepas dari permasalahan yang menyangkut dengan masalah perbedaan paham keagamaan. Permasalahan yang sering di jumpai iyalah dari permasalahan aliran atau paham sesat, khilafiyah pada cabang furu'iyah, bahkan yang sering menjadi keresahan masyarakat iyalah pihak yang menuduh pihak lain melakukan perbuatan bid'ah, melakukan praktek kemusrikan bahkan samapai mengkafirkan pihak lain yang tidak sepaham dengan paham yang di anutnya.

Ada sekelompok masyarakat yang memiliki paham yang berbeda dengan paham yang kebanyakan di anut oleh masyarakat setempat, ketika masyarakat setempat mengadakan peringatan hari besar Islam yaitu Muilid Nabi Muhammad SAW. dan peringatan isra' mi'raj maka sekelompok masyarakat yang memiliki paham berbeda ini mengatakan perbuatan itu adalah perbuatan bi'ah, karna hal itu tidak ada di lukan pada zaman Rasulullah. Dan setiap perbuatan bi'ah itu adalah neraka, dan masih banyak lagi kejadian dan peristiwa lainya yang berkaitan dengan masalah ini yang terjadi di kalangan masyarakat.

Masalah khilafiyah yang terjadi di kalangan masyarakat juga menjadi masalah yang sensitif dan mudah menimbulkan kontra di kalangan masyarakat, bahkan hal ini juga bisa berakhir pada fonis kafir oleh sebagian masyarakat yang memiliki paham yang radikal dan pemahaman qur'an secara tekstual saja. Salah satu contoh yang terjadi di masyarakat adalah ada sebagian masyarakat yang menganggap kafir kepada orang yang tidak berhukum pada hukum Allah. Dan

masalah khilafiyah yang banyak terjadi di masyarakat ialah seperti masalah qunut, do'a bersama, zikir berjamaah, dan bacaan qur'an untuk orang yang telah meninggal atau yang sering kita kenal dengan yasinan.

## **2. Konsep Operasional**

Berdasarkan latar belakang pada konsep teori di atas, maka selanjutnya penulis merumuskan konsep operasional yang mungkin menjadi tolok ukur penulis dalam melakukan penelitian.

Guna mengetahui sejauh mana upaya komisi Ukhwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia provinsi Riau dalam mengatasi masalah perbedaan paham keagamaan dapat di ketahui melalui indikator-indikator di bawah ini:

1. Pengurus memberikan himbauan kepada masyarakat dan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk meredam dan menghindari berbagai kemungkinan konflik yang terjadi di kalangan masyarakat.
2. Pengurus memiliki program atau kegiatan pemberian pemahaman atau pembinaan terhadap tokoh-tokoh dari kalangan ustad atau kiyayi dari setiap penganut paham yang berbeda.
3. Pengurus mensosialisasikan dengan memperbanyak buku-buku atau buletin tentang pentingnya ukhuah islamiyah dan rasa toleransi sesama umat Islam.
4. Pengurus bermitra dengan masyarakat dalam mengantisipasi konflik yang terjadi karena perbedaan paham.
5. Pengurus melakukan pengawasan setiap kegiatan atau pengajian yang akan memicu terjadinya konflik.

6. Pengurus melakukan bimbingan setiap orang yang memicu terjadinya konflik di masyarakat agar tidak meresahkan masyarakat yang lain.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini dilaksanakan di kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau di kota Pekanbaru, Jl Sudirman No. 717.

### **2. Subjek dan objek penelitian**

#### **a. Subjek penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau.

#### **b. Objek penelitian**

Sedangkan objek penelitian ini adalah upaya Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau dalam mengatasi masalah perbedaan paham keagamaan.

### **3. Populasi dan sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. (Sugiono, 2011:117)

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau yang berjumlah 64 orang dan terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dari keseluruhan Komisi yang ada di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2011: 118). Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sebanyak 10 orang dengan menggunakan sistem Purposive Sample, teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. (Arikunto, 2010: 183)

**4. Sumber data**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait melalui laporan-laporan, buku-buku, buletin, dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan peneliti.

**5. Teknik pengumpulan data**

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan 3 (tiga) cara diantaranya:

- a. Observasi, yaitu penulis mengamati langsung melihat kondisi lokasi penelitian tersebut mengenai upaya yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengatasi masalah perbedaan paham.
- b. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penulis dengan responden. (Sugiono, 2011: 194)

- c. Dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan permasalahan penelitian.

## **6. Teknik analisis data**

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat di beri arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. (Sugiono, 2011: 207)

Oleh karena itu, berdasarkan penyajian diatas, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang di peroleh di sajikan apa adanya, dan kemudian data tersebut di analisa tidak dalam bentuk angka.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Alasan Pemilihan Judul
- C. Penegasan Istilah
- D. Permasalahan
- E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

### **BAB II Gambaran Umum Lokasi Penelitian**



- A. Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau
- B. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau
- C. Orientasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau
- D. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau
- E. Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau
- F. Program Kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau

### BAB III Penyajian Data

- A. Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau dalam Mengatasi Perbedaan Paham Keagamaan
- B. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

### BAB IV Analisis Data

- A. Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau dalam Mengatasi Perbedaan Paham Keagamaan
- B. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

### BAB V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau**

Pada tahun 1969 pemerintah memprakasai berdirinya Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII). Pusat ini di bentuk oleh Menteri Agama dengan SK No. 108/1969, tanggal 4 September 1969. PDII yang di ketuai oleh KH. Muhammad Ilyas dan kemudian H. Seodirman, merupakan organisasi semi resmi di kelolo oleh sejumlah ulama dan cendekiawan yang dekat dengan pemerintah. Tujuan di bentuknya pusat dakwah ini adalah untuk meningkatkan kegiatan dalam rangka dakwah, dan mengkordinsai kegiatan itu baik dalam program-program kerjanya maupun konsultanya. Menteri agama ketika itu di jabat KH Ahmad Dahlan, beliau mengatakan bahwa berdirinya pusat dakwah ini di sambut baik persiden Seoharto dan di harapkan dapat mewujutkan kesatuan umat Islam Indonesia, suatu tema yang menjadi keprihatinan seluruh bangsa. (Dokumentasi, 4 Desember 2012)

Para pendukung PDII mengatakan bahwa berdirinya PDII yang di dukung pemerintah, yang di asuh oleh pentolan-pentolan Masyumi tidak di maksudkan untuk menyainginya, karena pemerintah juga mengajak serta Mohammad Natsir dan prawoto mangkusasmito ketua masyumi terakhir sebelum di bubarkan. Tetapi menolak karena sikap pemerintah selalu curiga terhadap bekas pimpinan-pimpinan masyumi. Namun demikian, Natsir dengan semangat mendorong dan mengharapkan kiranya kerja pusat itu dapat menjadi laboraturium dakwah dan

riset-risetnya dapat memberikan masukan yang sangat berarti bagi para da'i dan organisasi-organisasi dakwah lainnya untuk meningkatkan kualitas dakwah.

Salah satu karya besar PDII yang penting di kemudian adalah keberhasilan PDII menyelenggarakan musyawarah Alim Ulama seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 September hingga 4 September 1970. Dalam musyawarah yang bertemakan "Mewujudkan Kesehatan Alim Ulama dalam Pembangunan Nasional" itu peserta mengajukan usul untuk mendirikan "Lembaga Fatwa". Masalah lembaga fatwa ini kemudian menjadi isu sentral dalam musyawarah itu, namun sampai musyawarah berakhir tidak tercapai suatu keputusan. Mereka mengusulkan agar lembaga fatwa terdiri dari alim ulama dan cendekiawan Muslim terpilih, memiliki pengetahuan luas, sehingga fatwanya memiliki otoritas agama yang mengikat. Diharapkan pemerintah dapat menyokong lembaga fatwa itu, sehingga fatwa-fatwa yang diterbitkan dalam masyarakat dapat lebih mengikat, melalui dukungan pemerintah penyampaian fatwa terhadap masyarakat akan lebih mudah dilakukan.

Akan tetapi para peserta musyawarah juga mengkhawatirkan, bahwa adanya lembaga fatwa yang tidak independen itu hanya akan menjadi alat bagi pemerintah untuk mendikte ulama. Terhadap kekhawatiran demikian Menteri Agama menegaskan bahwa lembaga fatwa itu sebenarnya merupakan refleksi peran ulama dan sama sekali bukan dimaksudkan untuk mendikte ulama. Pemerintah ingin mencari jalan bagi meletakkan dasar kerjasama yang lebih baik antara pemerintah dan alim ulama, karena pemerintah dan ulama adalah mitra dalam membangun bangsa. (Dokumentasi, 4 Desember 2012)

Dalam musyawarah itu juga dibicarakan kemungkinan diangkatnya seorang mufti atau beberapa orang mufti Indonesia, tetapi usul semacam itu mendapat perlawanan dari sejumlah peserta yang hadir, karena seperti halnya dengan lembaga fatwa, muftipun dapat disalah gunakan oleh kekuasaan. Akhirnya musyawarah alim ulama tidak mengambil keputusan apa-apa mengenai lembaga fatwa maupun mufti, semua pemikiran dan gagasan-gagasan yang lahir dalam musyawarah itu menjadi catatan PDII untuk dijadikan studi lebih lanjut.

Empat tahun kemudian, tepatnya antara tanggal 26 hingga 29 November 1974, PDII memprakarsai kegiatan lokakarya yang disepakati suatu konsesus bahwa untuk memelihara kelanggengan partisipasi umat Islam dalam pembangunan diperlukan adanya Majelis Ulama atau lembaga semacamnya sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisme yang baik, terampil, cepat dan tepat. Jalanya mekanisme ini di dasarkan atas inisiatif dan aspirasi daerah-daerah sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing berdasarkan musyawarah ulama dan umara.

Untuk melaksanakan konsesus itu, Menteri Dalam Negeri mengintruksikan agar daerah-daerah yang belum membentuk Majelis Ulama segera dapat membentuknya. Maka pada bulan Mei 1975 hampir di seluruh daerah I dan II telah di bentuk Majelis Ulama Indonesia, perlu di ketahui bahwa beberapa daerah seperti di Jawa Barat dan Daerah Istimewa Aceh telah memiliki Majelis Ulama Indonesia sebelumnya prakarsa ini di mulai.

Pada tanggal 21 s/d 27 Juli 1975, Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang diikuti utusan-utusan dari Majelis Ulama yang dibentuk dalam musyawarah tersebut. Diantara garis-garis pokok saran persiden itu adalah:

1. Majelis Ulama hendaknya menjadi penerjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat.
2. Majelis Ulama agar mendorong memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun dari masa depan.
3. Majelis Ulama agar membri bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragam kepada pemerintah.
4. Majelis Ulama agar menjadi penghubung antara pemerintah dan ulama.
5. Kepengurusan Majelis Ulama sebaiknya menggambarkan keterwakilan unsur-unsur dari segenap golongan, sedangkan pejabat-pejabat pemerintah bertindak sebagai pelindung dan penasehat.
6. Majelis Ulama ini cukup hanaya mempunyai pengurus saja dan tidak perlu mempunyai anggota, sehingga dengan begitu tidak merupakan organisasi Islam yang telah ada.
7. Sebab itu Majelis Ulama ini tidak perlu mendirikan madrasah sendiri dan sebagainya, karna hal itu semua telah di tampung dan dikerjakan oleh organisasi-organisasi Islam yang bergerak dibidang Agama dan sosial.
8. Majelis Ulama tidak perlu bergerak dibidang politik karena wadah itu telah cukup tersedia dalam dua partai politik dan golkar yang telah kita miliki.

9. Untuk lebih gentukatkan kerukunan hidup antar umat beragama kita perlu membentuk semacam lembaga konsultasi antara umat beragama di Indonesia. (Dokumentasi, 4 Desember 2012)

Musyawarah Majelis Ulama Indonesia ke satu ini pada akhirnya mengeluarkan deklarasi mengenai berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang di tanda tangani oleh 53 peserta musyawarah, baik yang merupakan utusan daerah, organisasi, golongan pusrah ABRI maupun perorangan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan pada tanggal 26 Juni 1975. Majelis Ulama Indonesia ketika lahir diketuai oleh Prof. Dr. Hamka dan sekertaris umum Drs. H. Kafrawi MA, itu berfungsi sebagai:

- a. Memberikan fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar ma'ruf dan nahyi munkar, dalam usaha meningkatkan Ketahanan Nasional.
- b. Memperkuat Ukhwah Islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antara umat beragama.
- d. Penghubung antar umat beragama dan umara serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat umat guna menyukseskan pembangunan nasional.

Sebagai ciri-ciri terpenting dari Majelis Ulama Indonesia, bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak beraliansi kepada golongan politik manapun, serta tidak melakukan kegiatan operasional di luar tugas pokok dan fungsinya serta kegiatan

yang sudah dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam lainnya. (Dokumentasi, 4 Desember 2012)

Fungsi Majelis Ulama sebagai lembaga yang memberi fatwa selalu memberi dorongan ulama berperan serta dalam membangun bangsa. Fungsi fatwa juga menuntut ulama-ulama Indonesia selalu meningkatkan pengetahuan dan hukum-hukum Agama, serta mendorong mereka melakukan “ijtihad”. Hal ini memaksa mereka mengikuti dan menganalisa berbagai gejala dan perubahan dalam masyarakat. Maka dalam tempo 10 tahun lebih, sejak berdirinya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan banyak fatwa maupun pedoman-pedoman yang berkaitan dengan berbagai masalah kemasyarakatan dan Agama. Dari soal keluarga berencana, perayaan natal bersama sampai fatwa tentang ternak kodok dan lain sebagainya. Majelis Ulama Indonesia dapat dikatakan sebagai lembaga tertinggi Agama Islam Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai lembaga tertinggi Islam, ulama yang duduk didalamnya melalui mekanisme dalam saluran tersendiri yang mungkin berbeda dari saluran yang membentuk tipe keulamaan yang selama ini ada, sebelum ada Majelis Ulama Indonesia di kenal tipe-tipe ulama dengan saluran pembentuk yang berbeda-beda yaitu ulama bebas, ulama pejabat, dan ulama pemimpin organisasi. Ulama bebas dibentuk dari saluran pengakuan sosial, ulama pejabat dibentuk melalui saluran birokrasi, sedang ulama pemimpin organisasi dibentuk oleh ikatan solidaritas yang diformalkan dalam bentuk organisasi. Tentu saja ada ulama yang terbentuk oleh berbagai saluran itu, tetapi mereka yang duduk didalam Majelis Ulama Indonesia ada yang belum memperoleh pengakuan sosial, tidak pula memiliki pengikut serta bukan pula

sebagai pejabat, hal ini memperlihatkan adanya gejala pergesekan konsep keulamaan. Jadi, disamping ada keulamaan sebagai status dan profesi kini ada keulamaan sebagai peran sosial.

Dari sudut pandang lain, adanya Majelis Ulama Indonesia juga dapat dilihat sebagai saluran dimana ulama dikaderkan. Suatu kekhawatiran yang sering terlontar dimedia maupun ditengah masyarakat adalah persoalan semakin sedikitnya jumlah ulama, serta tidak adanya saluran kaderisasi yang menjamin terciptanya ulama-ulama baru yang berkualitas. Maka dengan adanya Majelis Ulama Indonesia persoalan makin langkanya ulama tidak saja menjadi tanggung jawab umat Islam, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Ulama baru akan dapat dilahirkan karena dipaksa oleh tuntutan formal mengisi formasi Majelis Ulama Indonesia, baik yang di pusat maupun daerah-daerah.

Disamping itu, berhimpunnya ulama dalam wadah Majelis Ulama Indonesia ditengah perubahan konstalasi politik Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang No 35/85 dan No 8/85, tentang keormasan dan partai politik, telah memperkokoh kedudukan mereka diatas semua kelompok dan semua golongan politik yang ada. Sehingga Majelis Ulama Indonesia ulama memiliki citra baru, yaitu sebagai pemimpin umat yang mempunyai kekuatan moral terdapat semua kekuatan politik, sebagai pemelihara kelurusan. Maka mayoritas fatwa-fatwa dan nasehat Majelis Ulama Indonesia pun berlaku untuk partai-partai politik. (Dokumentasi, 4 Desember 2012)



## **B. Visi Dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau**

### **1. Visi**

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT. (*baldataun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Iaslam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

### **2. Misi**

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
- b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
- c. Megembangkan ukhwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( Dokumentasi, 4 Desember 2012)

## **C. Orientasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau**

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

### 1. *Diniyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang *kaffah*.

### 2. *Irsyadiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia pada kebaikan serta melaksanakan *amar makruf dan nahyi munkar* dalam ati yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia di maksudkan untuk dakwah dan di rancang untuk selalu berdimensi dakwah.

### 3. *Istijabiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi *istijabiyah*. Senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang di hadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dan semangatberlomba dalam kebaikan (*istibab fi al-khairat*).

### 4. *Hurriyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen bebas dan merdeka serta tidak terganggu maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

### 5. *Ta'awuniyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong terhadap kaum dhu'afa untuk memperoleh kebaikan, ketakwaan dan meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat

kehidupan masyarakat. Semangat ini didasarkan atas persaudaraan di kalangan seluruh lapisan Umat Islam (*Ukhwah Islamiyah*). Ukhwah Islamiya ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*Ukhwah wathaniyyah*) dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (*Ukhwah Basyariyyah*).

#### 6. *Syuriyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

#### 7. *Tasamuh*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah *Khilafiyah*.

#### 8. *Qudwah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

#### 9. *Duwaliyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam. ( Dokumentasi, 4 Desember 2012)

#### **D. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau**

##### **1. Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (*Waratsat al-anbiya*)**

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan Agama Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai *Waratsatu al-anbiya* (ahli waris tugas-tugas para Nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (*an-nubuwwah*) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

##### **2. Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*)**

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaan.

##### **3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ra'iy wa Khadim al ummah*)**

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula Majelis Ulama Indonesia

berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

#### 4. Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahyi Munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah. Dengan demikian Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (Mujahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khairu ummah*).

#### 5. Sebagai Pelopor Gerakan Pembaruan (*al- Tajdid*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *tajdid* yaitu gerakan pembaruan Islam.

#### 6. Sebagai Pelopor Gerakan *Ishlah*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *al jam'u wat taufiq* (kompromi dan persesuaian) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian di harapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (*uhkuwwah*) di kalangan umat Islam Indonesia. (Dokumentasi, 4 Desember 2012)

### **E. Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau**

Ketua Umum : Prof. Dr. H. Mahdini, MA

Ketua I	:	Drs. H Syamsul, Hs
Ketua II	:	Drs. H. Raja Ramli Ibrahim
Ketua III	:	Drs. H. Ramli Khatib
Ketua IV	:	Prof. Dr. H. Ilyas Hust, M.Ag
Ketua V	:	Drs. H. M Roem Zein
Ketua VI	:	Dr.H. Mawardi M Saleh, Maa
Ketua VII	:	H. Syafruddin Sa'an, Lc
Ketua VIII	:	H. Ridwan Syarif, S. Ag
Sekretaris Umum	:	H. Fajeriansyah, Lc, MA
Sekretaris I	:	Dr. H. Jamaluddin R, MA
Sekretaris II	:	H. Masyhuri Putra, Lc, MA
Bendahara	:	H. Marmo Moyasa
Ketua komisi pengembangan hukum dan		
Penetapan fatwa	:	Drs. H Abdurrahman. Q
Sekretaris komisi	:	H. M Abdih, Lc, MA
Anggota	:	H. Nixon Husin, Lc, MA
Anggota	:	Drs. Hajar. M, MH
Anggota	:	Drs.H. M Yusuf Ahmad
Anggota	:	H. Syamsuddin Muir, MA
Anggota	:	H. Helmi Basri, Lc, MA
Ketua komisi pendidikan dan dakwah	:	Drs. H. Abdul Razak, MM
Sekretaris komisi	:	H. Jumhur Rahmat, MA
Anggota	:	Drs. H. Rasyad Zein, MM
Anggota	:	Dr. H. Safroni, MA
Anggota	:	Drs. H. Syahril Ali, MA

Ketua komisi pengembangan ukhuwah

Islamiyah kerukunan antar umat beragama

Dan hubungan luar negri : Dr. H. M Fakhri, MA

Sekretaris komisi : Drs. Taslim P, MA

Anggota : Zulhusni Domo, S. Ag

Anggota : Ir. H. Muhammadun

Anggota : Dra. Hafny Ma'rifat

Ketua komisi pengkajian dan pengembangan

Keorganisasian : Dr. Zulkayandri, M. Ag

Sekretaris komisi : Drs. Husni Thamrin, MSi

Anggota : H. Zulfadhli, Lc, MA

Anggota : H. Abdusomad, Lc, MA

Anggota : Drs. H. Muliardi, M. Pd

Ketua komisi ekonomi Islam : Dr. Heri Sunandar, M.Sc

Sekretaris komisi : Mawardi, S.Ag, M Si

Anggota : Drs. Suhardi

Anggota : Drs. H. Rasyidi Hamzah

Anggota : Drs. H. Amaruddin, M. Ag

Ketua komisi sosial dan kesejahteraan umat : Drs. H. Abdullah S, M.Hm

Sekretaris komisi : Hasyim, S. Pdi, MA

Anggota : Drs. H. Mudasir, M.Pd

Anggota : Drs. H. Ali Jabar Nasution

Anggota : Ahmad Yani, SH

Ketua komisi hubungan masyarakat : H.M. Saman, S.Sos,M.Si

Sekretaris komisi : Drs. H. A Supardi Hasibuan

Anggota	:	H. Said Lukman
Anggota	:	H. Zen Zaeni Ahmad, SE
Anggota	:	Idris Ahmad
Ketua komisi perempuan remaja dan		
Keluarga	:	Dra. Syafrida, MA
Sekretaris komisi	:	Dra. Nursalmah Zainal
Anggota	:	Dr. Hj. Sri Wahyuni
Anggota	:	Hj. Mahfuzoh Ismail, S. Ag
Anggota	:	Dra. Hj. Hefni Yulia
( Observasi, 07 Desember 2012)		

## **F. Program Kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau**

1. Komisi Pengembangan Hukum dan Penetapan Fatwa
  - a. Membuka Kotak Pos MUI; Menampung masalah hukum masyarakat.
  - b. Melengkapi bahan-bahan referensi; Memperkaya wawasan intelektual.
  - c. Menyusun jadwal muzakarah internal; Menyelesaikan, menjawab masalah yang di sampaikan kepada komisi fatwa.
  - d. Menyatukan visi antar lembaga dakwah; Melakukan ukhuwah Islamiyah.
  - e. Mengirimkan utusan dalam mem bahas RANPERDA dan PERDA; Pelatihan fatwa menyamakan visi dan misi.
  - f. Membantu dan memberikan masukan kepada Pemerintah dalam pembuatan PERDA; Berperan aktif dalam pembuatan PERDA
  - g. Mengadakan seminar tentang Arbitrase; Membantu Pemerintah dalam menjalankan PERDA sesuai dengan visi dan misi Riau.



- h. Konsolidasi dengan BASYAR NAS Pusat; Mengetahui otoritas MUI.
  - i. Menghimpun fatwa MUI Pusat dan Daerah; Menyatukan visi dan membentuk Badan Arbitrase Syari'ah.
  - j. Membentuk Dewan Redaksi Fatwa; Menjelaskan kedudukan BASYARNAS di Daerah.
  - k. Menerbitkan buku kumpulan Fatwa MUI Provinsi Riau; Mengidentifikasi dan mengklasifikasi.
  - l. Publikasi dalam berbagai bentuk; Memudahkan koordinasi kerja.
  - m. Menyusun argumentasi Fiqhiyah; Penggandaan buku Fatwa.
  - n. Penyusunan argumentasi terha-dap Undang-undang Zakat; Menyampaikan hasil fatwa kepada masyarakat.
  - o. Undang-Undang Haji Membentuk Fiqh Indonesia; Membentuk Fiqh Indonesia.
  - p. Studi banding dan kunjungan muhibbah Malaysia dan Singapura.
2. Komisi Pendidikan dan Dakwah
- a. Pembuatan Peta Dakwah; Mendapatkan deskripsi lengkap peta Dakwah di Provinsi Riau dengan melakukan penelitian lapangan, mempersiapkan tenaga peneliti yang berkualitas, menyusun draf yang relevan, mendapatkan data terbaru yang valid dan akurat, mengkompilasi dan merumuskan data, menghasilkan laporan yang komprehensif dan dapat dipertanggung jawabkan kualitasnya secara ilmiah, mendapatkan sebuah peta dakwah.
  - b. Pengembangan Dakwah di wilayah rawan sosial; Tersedianya Da'i-Da'i profesional yang siap turun ke daerah-daerah rawan sosial, berkembangnya kehidupan umat Islam sesuai dengan syari'at dan nilai-nilai budaya Melayu,

meminimalisir perkembangan gerakan kristenisasi dan kemaksiatan ditengah masyarakat, diperolehnya informasi valid tentang perkembangan dakwah di daerah rawan sosial, tersedianya data sebagai bahan penyusunan rencana dan kegiatan dakwah selanjutnya.

- c. Pelatihan Da'i; Terlaksananya kaderisasi Da'i yang ber kesinambungan guna memenuhi kebutuhan umat, tersedianya Da'i yang berkualitas dan siap membimbing umat dalam beragama dan bermasyarakat.
  - d. Penulisan Profil ulama di Riau; Terwujudnya buku tentang profil ulama di Riau.
  - e. Dakwah Melalui Media; TVRI Pekanbaru, RRI Pekanbaru, RTV dan Media Cetak.
  - f. Seminar pengembangan lembaga pendidikan Islam di Riau; Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat perkembangan lembaga pendidikan Islam menemukan solusi.
  - g. Safari Dakwah; Memberikan Dakwah kepada anggota.
  - h. Pembuatan Buku Khutbah; Membantu para Da'i pedesaan untuk melakukan Dakwah.
  - i. Bantuan Al Qur'an dan Buku Agama; Masyarakat desa meningkatkan SDM anggota masyarakat dan memotivasi serta memberikan bantuan buku.
3. Komisi pengembangan Ukhwah Islamiyah kerukunan antar umat beragama Dan hubungan luar Negeri.
- a. Mempererat Ukhuwah Islamiyah, wathoniyah dan basyariyah; Pertemuan silaturahmi, pemahaman yang utuh dalam persudaraan umat,

pertemuan berkala antar organisasi Islam dan Lembaga-lembaga Dakwah.

- b. Konsolidasi Organisasi; Pertemuan Silaturahmi, Mempererat Ukhuwah Islamiyah, wathoniyah dan basyariyah,
- c. Mewujudkan Kerukunan umat beragama; Memprakasai terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau.
- d. Hubungan Luar Negeri; Memberi informasi tukar menukar informasi, kunjungan muhibbah.
- e. Tauhidul Fikry antar lembaga Dakwah; Melakukan Seminar dan lokakarya tentang aliran sesat.
- f. Membukukan; Menghimpun peraturan-petauran Pusat dan Daerah tentang kerukunan ummat beragama.

4. Komisi Pengkajian dan Pengembangan Keorganisasian

- a. Penataran; Penataran dan sosialisasi Mahkamah Konstitusi guna memeberikan pembekalan tentang tugas Komisi Pengkajian, Pengembangan Hukum dan Perundang-Undangan.
- b. Mengkaji Rancangan Undang-Undang anti Pornografi dan Pornoaksi; Terwujudnya konsep Undang-undang anti Porgrafi dan Pornoaksi.
- c. Penyuluhan Hukum; Memberikan penjelasan kepada peserta didik.
- d. Mengkaji Rancangan Peratur-an UU No. 1 Th. 1974 Ttg. Perkawinan; Penyempurnaan UU No. 1 Th. 1974.
- e. Mengikuti Pelatihan Tentang KUMDANG di MUI Pusat; Menyatukan presepsi tentang tugas-tugas komisi KUMDANG

- f. Mengkaji dan mensosialisasi-kan Peraturan Perundang-undangan yg ada hubungan dengan hukum Syari'ah; Agar masyarakat mengetahui posisi Hukum Islam dalam Negara RI, menghayati serta mengamalkan.
- g. Mengkaji draf Rancangan Undan-Undang anti kekerasan dalam rumah tangga; Lahirnya suatu draf atau konsep undang-undang yang mengatur dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.
- h. Mengkaji Undang-Undang Wakaf; Lahirnya suatu konsep Rancangan Undang-Undang Wakaf sebagai penyempurnaan peraturan yang telah ada.
- i. Membukukan; Menghimpun peraturan-petaturan Pusat dan Daerah tentang kerukunan ummat beragama.
- j. Mengkaji Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama; SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber/MENAG/MDN/1969 ditingkatkan menjadi Undang-Undang dan penetapan peraturan Presiden RI Nomor: 1 th. 1965 dan lain-lain.
- k. Menginventarisasi pakar Hukum Islam yang berada dan berpendidikan dalam dan luar negeri.
- l. Mempersiapkan draf usulan atau penyusunan penegak syari'at Islam; Seluruh PERDA dan peraturan yang mengi kat dilandasi dengan syari'at Islam.
- m. Mengadakan pertemuan secara berkala; Membahas beberapa masalah hukum Per Undang-Undangan yang sedang dan akan berlaku.

- n. Penerbitan Buku KUMDANG; Menghimpun dan menggandakan hasil-hasil kerja setahun.

5. Komisi ekonomi Islam

- a. Mengadakan pertemuan antara MUI dan komaroe; Menyelesaikan masalah interen Komaroe degan MUI Provinsi Riau, mencari solusi penyelesaian kasus Komaroe dengan PT Mapalarapda, mencari alternative pengembangan ekonomi dan sektor usaha mikro Komaroe untuk kesejahteraan anggota Komaroe dan pengurus ekonomi
- b. Dialog dengan pengusaha dan departemen terkait dalam rangka mamaju kan program pengembangan ekonomi dan kemandirian MUI; Mencari alternatif pengembangan ekonomi umat, mendorong percepatan perkembangan lembaga keuangan Islam di Riau.
- c. Training atau workshop Ekonomi Islam ( lanjutkan ); Mempersiapkan tenaga profesional dalam bidang ekonomi Islam.
- d. Mensosialisasikan BASARDA di MUI Provinsi Riau dan Kab/Kota se Riau; Dapat membantu penyelesaian kasus-kasus perdata lembaga keuangan Islam di Riau.
- e. Workshop manajemen keuang an Islam untuk lembaga keuangan mikro; Melatih pelaku ekonomi mikro agar telah profesional dan Islami.
- f. Work Shop Ekonomi Islam; Seminar dan Lokakarya Perbankan Syariah “ Peranan Bank Syar’iah Dalam Membangun Ekonomi Yang Islami “ Kerjasama MUI Provinsi Riau dengan BI, Bank Mu’amalat, Bank Syari’ah Mandiri, Bank Riau Syari’ah, BNI Syari’ah dan BRI Syari’ah

6. Komisi sosial dan kesehjateraan umat

- a. Meningkatkan kerja sama dengan instansi dan badan terkait dalam mengatasi korban bencana, kerusakan moral serta segala bentuk kejahatan dan hal-hal lain kekerasan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Agama.
- b. Meningkatkan kepedulian terhadap kaum du'afa, baik secara konseptual maupun secara operasional.

7. Komisi hubungan masyarakat.

- a. Melakukan upaya pengadaan dan pengembangan media komunikasi dan informasi baik cetak, elektronik maupun digital untuk mensosialisasikan segala capaian MUI secara nasional regional maupun global.
- b. Membangun karangan media komunikasi digital, melalui pemanfaatan internet yang dapat menghubungkan secara cepat antara MUI pusat dan MUI daerah segaluruh daerah seluruh Indonesia dan ormas serta lembaga Islam lainnya.

8. Komisi perempuan remaja dan Keluarga

- a. Menyusun Ranperda tentang berpakaian Melayu dan busana Muslimah di Bumi Lancang Kuning; Merealisasikan hasil MUSDA IV MUI Prov. Riau, Mensosialisasikan program " Pencanangan Pakaian Muslimah di tanah Melayu " seminar sehari.
- b. Lomba busana Muslimah; Untuk mensosialisasikan dan merealisasikan program pakaian Muslimah di tanah Melayu.

- c. Membuat tulisan di media cetak oleh anggota komisi perempuan, remaja dan keluarga MUI Provinsi Riau tema " Muslimah dan Permasalahannya; Mensosialisasikan , memberi penjelasan dan solusi terhadap berbagai permasalahan muslimah baik di dalam rumah tangga dan masyarakat.
- d. Kerjasama dengan media elektronik ( RRI dan TVRI Pekanbaru ) mengemas acara " Kisah-kisah Kehidupan Muslimah; Memberikan contoh tauladan mengenai keberhasilan wanita muslimah dalam menghadapi kendala kehidupan.
- e. Forum dialog MUI dengan tema:" Membentuk Kepribadian Muslimah " Topik: Keluarga Sakinah, Muslimah dan HAM "; Mensosialisasikan komisi perempuan MUI Provinsi Riau, merealisasikan hasil MUSDA IV MUI Provinsi Riau, mewujudkan aksi bersama dalam meralisasikan kepribadian muslimah yang seutuhnya ditengah masyarakat, mengurangi atau memberantasi aksi pornografi, porno aksi dan porostitusi.
- f. Kunjungan ketempat prostitusi pengidap HIV dan AIDS; Menumbuhkan kesadaran pengamalan agama dan mengurangi jumlah wanita pekerja seks komersial dan menyelamatkan wanita korban penipuan dan kekerasan, Memberikan penyuluhan agama kepada pengidap maupun kepada generasi muda yang belum tertular HIV, AIDS di Kabupaten Kota se Riau. (Dokumentasi, 08 Desember 2012)

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA**

##### **A. Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam Mengatasi Perbedaan Paham Keagamaan**

Pada bab ini, data yang disajikan berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Penelitian ini di lakukan untuk mendapatkan data tentang upaya dalam mengatasi perbedaan paham keagamaan. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara langsung, observasi dan didukung oleh dokumentasi. Dalam penelitian ini tidak menggunakan angket, karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Wawancara yang penulis lakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis, dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian.

Observasi ini di lakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat untuk mendukung dari data wawancara yang telah di dapatkan, untuk itu observasi ini dilakukan agar data tersebut terbukti kebenarannya.

Dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk melengkapi data-data penelitian. Adapun pengambilan data dilakukan di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Setelah penulis memperoleh data dari hasil penelitian maka penulis merumuskan hasil penyajian data sebagai berikut:



***a. Pengurus memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan munculnya masalah yang diakibatkan oleh perbedaan paham keagamaan.***

Sebagai organisasi Islam yang bertugas sebagai penerus para Nabi, maka Majelis Ulama Indonesia selalu memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat melalui Da'i atau juru Dakwah yang telah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia guna meredam kemungkinan konflik yang terjadi dimasyarakat akibat perbedaan paham keagamaan dan memberikan pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya Ukhwah Islamiyah dan rasa saling menghargai.

Menurut bapak Mahdini (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau) Majelis Ulama Indonesi dalam memberikan himbauan memiliki pendukung yang kuat yaitu pemerintah dan memiliki alat yaitu ormas-ormas Islam. Dan lembaga Dakwah seperti MDI, IKMI, TARBIYAH dan masih ada yang lainnya, jadi Majelis Ulama Indinesia dari awal telah mengingatkan kepada pendakwah agar selalau mengingatkan kepada masyarakat tentang pemahaman Islam dan pentingnya rasa toleransi dan Ukhuwah Islamiyah (wawancara, senin 10 Desember 2012).

Menurut bapak Muhammad Abdih bahwa tidak hanya melalui ormas Islam dan lembaga Dakwah, untuk meredam masalah yang terjadi di masyarakat. Majelis Ulama Indonesi memberikan himbauan langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya bertoleransi dan menerima perbedaan paham keagamaan yang ada, karena bila ada di kalangan kelompok masyarakat yang tdak bisa menerima perbedaan, maka akan terjadi kesenjangan di masyarakat yang akhirnya

menimbulkan keresahan bagi masyarakat (wawancara, Jum'at 07 Desember 2012).

***b. Pengurus mengadakan pertemuan-pertemuan untuk meredam dan menghindari berbagai kemungkinan konflik yang terjadi dikalangan masyarakat.***

Menurut bapak Abdurrahman Qaharudin (Ketua komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau) untuk masalah ini, Majelis Ulama Indonesia mengadakan pertemuan dengan mengundang dari berbagai ormas Islam dan dari kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki paham yang berbeda guna memberi pencerahan terhadap mereka. Dan Majelis Ulama Indonesia juga melakukan pertemuan-pertemuan bila hal itu memang diperlukan (wawancara, Selasa 04 Desember 2012)

Menurut bapak Muhammad Abdih selain mengadakan pertemuan-pertemuan Majelis Ulama Indonesia juga memberikan pelatihan, pelatihan ini dilakukan bukan hanya tingkat ibukota kabupaten bahkan pelatihan ini dilakukan hingga tingkat Provinsi kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gesekan di kalangan masyarakat yang nantinya akan menimbulkan konflik dan meresahkan bagi masyarakat (wawancara, Jum'at 07 Desember 2012).

***c. Program yang dibuat oleh pengurus dalam mengantisipasi konflik yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan paham keagamaan.***

Program adalah salah satu hal yang terpenting dalam sebuah organisasi Islam guna menyelesaikan masalah yang muncul di kalangan masyarakat, untuk itu

Majelis Ulama Indonesia juga memiliki program yang telah disusun dan di buat guna untuk di jalankan.

Menurut bapak Jamhur rahmat (Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau) menuturkan bahwa untuk masalah perbedaan paham yang terjadi di masyarakat, Majelis Ulama Indonesia memiliki program yaitu;

1. Majelis Ulama Indonesia memiliki program dialog yang sering di namakan dengan irsyadiah dan memberikan pencerahan terhadap masyarakat.
2. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan ormas-ormas Islam dan kelompok-kelompok yang memiliki paham yang berbeda.
3. Memberikan pengarahan dan pencerahan terhadap masyarakat.
4. Memberikan pembinaan terhadap masyarakat yang memicu terjadinya konflik.
5. pengurus mengadakan kerja sama dengan lembaga dan ormas Islam guna membimbing Da'i transmigran sesumatra.
6. Memperbarui fatwa yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan Ukhwah Islamiyah. (wawancara, Rabu 05 Desember 2012)

***d. Pengurus memberikan pemahaman atau pembinaan terhadap tokoh-tokoh dari kalangan ustaz atau kiyayi dari setiap penganut paham yang berbeda tentang pentingnya Ukhwah Islamiyah.***

Menurut bapak Muhammad Abdih Untuk pertemuan terhadap tokoh-tokoh, ustaz dan para kiyayi, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengadakan silaturahmi yang bertujuan untuk berdiskusi dan berdialog guna memberi pencerahan namun tidak bersifat mendakwahi, hal yang didiskusikan iyalah

mengenai paham keagamaan, Ukhwah Islamiyah dan toleransi antar penganut paham yang berbeda, sehingga tidak menimbulkan konflik yang meresahkan masyarakat. (wawancara, jum'at 07 Desember 2012).

Meurut bapak Ramli khatib (ketua harian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau) Majelis Ulama Indonesia selalu mengadakan pertemuan yang dinamakan dengan forum silaturahmi, gunanya adalah memberikan pemahaman kepada para mubalik yang berasal dari berbagai lembaga Dakwah dan ormas Islam tentang perlunya Ukhwah Islamiyah, karena mereka yang nantinya akan terjun kepada masyarakat untuk menyampaikan dan berdakwah kepada masyarakat secara langsung. (wawancara, Selasa 11 Desember 2012)

***e. Pengurus mensosialisasikan dengan memperbanyak buku-buku atau buletin tentang pentingnya Ukhwah Islamiyah dan rasa toleransi sesama umat Islam.***

Menurut bapak Abdurrahman Untuk buletin dan buku-buku Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau belum menerbitkan, hanya menerima kiriman buletin dan buku-buku dari MUI pusat yang kemudian disebarkan ke Majelis Ulama Indonesia daerah guna dijadikan sumber untuk disampaikan pada masyarakat, buku-buku dan majalah yang ada di Majelis Ulama Indonesia sekarang ini yang sering dikirim oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat adalah seperti Mimbar Ulama. (wawancara, Selasa 04 Desember 2012)

***f. Pengurus bermitra dengan Masyarakat dalam mengantisipasi konflik yang terjadi karena perbedaan paham.***

Menurut bapak Ramli Khatib mengatakan bahwa untuk kerjasama dengan masyarakat, masyarakat langsung melaporkan pada pihak Majelis Ulama Indonesia bila ada masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga pihak Majelis Ulama Indonesia langsung turun kelapangan untuk berdialog dengan masyarakat guna mencari solusi dan jalan keluar. (wawancara, Selasa 11 Desember 2012)

Dan bapak Jumhur Rahmat menambahkan juga bahwa Majelis Ulama Indonesia bermitra dengan masyarakat dengan menerima pengaduan dari masyarakat untuk masalah yang berkembang dan meresahkan di lingkungan masyarakat agar bisa diambil kebijakan oleh pihak Majelis Ulama Indonesia. (wawancara, Rabu 05 Desember 2012)

***g. Upaya pengawasan dilakukan pada setiap kegiatan atau pengajian yang akan memicu terjadinya konflik.***

Menurut bapak Syamsuddin Munir beliau mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia melakukan pengawasan terhadap pengajian-pengajian atau holakoh yang ada, dan melakukan pengamatan sehingga dapat menyimpulkan apabila pengajian tersebut meresahkan bagi masyarakat, maka pihak Majelis Ulama Indonesia akan mengambil kebijakan dengan menemui atau melakukan pertemuan terhadap kelompok tersebut, dan bila telah jauh menyimpang maka Majelis Ulama Indonesia akan melaporkan pada pihak yang berwajib. (wawancara, Jum'at 07 Desember 2012)

Bapak Fajeriansyah (sekertaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau) mengatakan untuk masalah yang berkaitan dengan masalah sosial-

keagamaan kontemporer di lakukan dengan cara menghadirkan dan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari pihak-pihak yang terkait masalah yang terjadi, baik dari unsur masyarakat, lembaga-lembaga profesi, lembaga-lembaga sosial maupun lembaga negara. Selain itu jika diperlukan Majelis Ulama Indonesia juga akan memanggil para ahli dibidang masalah yang di bahas. Setelah dilakukan pengkajian dan penelaahan dari pihak-pihak terkait dan ahli, barulah sidang komisi fatwa digelar untuk menghasilkan keputusan fatwa yang lebih objektif dan komprehensif. (wawancara, jum'at 07 Desember 2012).

***h. Pengurus melakukan bimbingan pada setiap orang dan kelompok yang memicu terjadinya konflik dimasyarakat agar tidak meresahkan masyarakat yang lain.***

Menurut bapak Abdurrahman Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi yang proaktif, yang tidak hanya memberi saja, namun juga menerima, bila Majelis Ulama Indonesia menerima laporan bahwa ada kelompok yang meresahkan bagi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia mengundang kelompok tersebut untuk diajak berdiskusi dan memberikan bimbingan, untuk masalah ini Majelis Ulama Indonesia juga telah menyerahkan kepada ormas-ormas Islam yang ada dan Majelis Ulama setempat, karena Majelis Ulama Indonesia sekarang sudah memiliki cabang terkecil hinga pada tingkat kecamatan.

Bapak Fajeriansyah mengatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah keagamaan (*masail diniyyah*) meliputi masalah aqidah (aliran paham keagamaan yang menyipang), masalah ritual keagamaan (*'ubudiyyah mahdhah*), dan masalah yang terkait dengan pernikahan (*al-ahwal as-syakhsiyyah*). Masalah sosial-

keagamaan kontemporer (*masail diniyyah ijtimaiyyah waqi'iyah mu'ashirah*) meliputi masalah aktual yang muncul ditengah masyarakat yang terkait dengan perkembangan science dan teknologi, kedokteran dan medis, serta isu-isu kemasyarakatan yang membutuhkan fatwa.

Dalam setiap pengambilan keputusan, komisi fatwa yang berkerja sama dengan komisi lainnya memiliki mekanisme dan prosedur penetapan fatwa sesuai masalah yang di bahas. Fatwa yang berkaitan dengan aqidah (Aqidah dan paham keagamaan) terlebih dahulu di lakukan penelitian dan pengkajian oleh komisi pengkajian dan fatwa terhadap ajaran dan praktek keagamaan dari aliran yang di kaji. Hasil penelitian dan pengkajian selanjutnya di laporkan ke sidang komisi fatwa untuk di bahas dan di putuskan fatwanya. Tidak semua hasil kajian terhadap sebuah aliran atau paham keagamaan diputuskan fatwanya, jika aliran tersebut bersedia untuk di bina dan bimbing maka dilakukan pembinaan dan pembimbingan. (wawancara, selasa 04 Desember 2012)

Bapak Ramli Khatib juga sedikit menambahkan Majelis Ulama Indonesia juga melakukan pembinaan secara Umum dan perorangan (individu) yang waktunya tidak di tentukan. (wawancara, selasa 11 Desember 2012)

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya**

Adapun yang menjadi faktor pendukung Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam mengatasi perbedaan paham adalah:

1. Memiliki koordinasi yang bagus.
2. Sarana dan prasarana yang memadai.

3. Karana Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang resmi maka ia sangat kuat untuk memberi bimbingan.
4. Untuk kepengurusanya terdiri dari berbagai ormas Islam yang ada di dalamnya.
5. Organisasi Majelis Ulama Indonesia berada dalam naungan pemerintah, dan mendapat bantuan yang sifatnya tidak mengikat.

Dan adapun faktor yang menjadi penghambat dalam berjalanya kerja Majelis Ulama Indonesi Provinsi Riau adalah:

1. Kurangnya waktu dan tenaga pengurus.
2. Sulit dalam masalah pengkaderan pengurus karena kualitas SDM yang kurang berkompeten.
3. Struktur organisnya yang terlalu banyak anggota kepengurusannya, maka hal itu menjadikan lambat dalam bergerak.
4. Karena di kalangan masyarakat banyak terdapat ormas-ormas Islam, maka ada sebagian dari ormas tersebut yang mengabaikan fatwa yang di putuskan oleh pihak Majelis Ulama Indonesia.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

Setelah data penulis sajikan pada bab III, selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah penulis dapatkan dalam penelitian, untuk mengetahui upaya dalam mengatasi perbedaan paham keagamaan. Analisis data yang penulis lakukan adalah dengan cara analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kembali data yang penulis dapatkan di lapangan dimana penulis melakukan penelitian. Untuk lebih jelasnya data tersebut penulis analisis sebagai berikut:

#### **A. Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam Mengatasi Perbedaan Paham Keagamaan.**

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Samsul Amin dalam bukunya Ilmu Dakwah mengatakan bahwa benang-benang ukhuwah Islamiyah antara elemen dan golongan umat Islam harus di rajut dengan menjalankan aktifitas-aktifitas keagamaan seperti dakwah, seminar, mengadakan pertemuan antar golongan atau kelomok organisasi ataupun non organisasi atau lembaga. Dengan demikian membina persaudaraan di antara umat islam akan dapat terealisasikan. Jika ada perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) maka itu adalah suatu keniscayaan, akan tetapi perbedaan tersebut mesti di cari titik temunya. Sehingga perbedaan pendapat akan menjadi rahmat, bukan menjadi perpecahan di kalangan uamat. (Munir, 2009: 220)

Dari hasil temuan masalah yang ada dilapangan Majelis Ulama Indonesia telah melakukan upaya dengan baik bila dilihat dari teori yang diungkapkan oleh

Samsul Amin. Hal itu bisa dilihat dari analisis penulis berdasarkan hasil wawancara pada senin 10 Desember 2012 bahwa Majelis Ulama Indonesi dalam memberikan himbauan kepada masyarakat memiliki pendukung yang kuat yaitu pemerintah dan memiliki alat bantu dalam menyampaikan himbauannya kepada masyarakat yaitu lembaga dakwah seperti MDI, IKMI, Tarbiyah dan di bantu oleh ormas-ormas Islam yang ada di masyarakat. Dan selain melalui lembaga dakwah dan ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia juga memberikan himbauan secara langsung kepada masyarakat.

Pengurus mengadakan pertemuan-pertemuan yang bertujuan untuk meredam dan menghindari berbagai kemungkinan konflik yang terjadi dikalangan masyarakat menurut analisis penulis dari hasil wawancara selasa 04 Desember 2012 untuk memberikan suatu pemahaman terhadap ormas Islam dan kelompok masyarakat yang memiliki paham keagamaan yang berbeda agar tidak terjadi pergesekan di antara kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan konflik, maka Majelis Ulama Indonesia mengadakan pertemuan dengan mengundang dari berbagai ormas Islam dan dari kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki paham yang berbeda guna memberi pencerahan terhadap mereka. Dan Majelis Ulama Indonesi juga memlakukan pertemuan-pertemuan bila hal itu memang diperlukan serta mengadakan pelatihan-pelatihan yang bertemakan Ukhuwah Islamiyah yang di selenggarakan mulai dari tingkat ibukota kabupaten hingga tingkat Provinsi.

Menurut hemat penulis dalam mengatasi masalah perbedaan paham keagamaan yang terjadi di masyarakat Majelis Ulama Indonesia memiki program-

program yang di buat dan dilaksanakan yaitu program dialog yang sering di namakan dengan irsyadiah dan memberikan pencerahan terhadap masyarakat, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan ormas-ormas Islam dan kelompok-kelompok yang memiliki paham keagamaan yang berbeda, memberikan pengarahan dan pencerahan terhadap masyarakat, memberikan pembinaan terhadap masyarakat yang memicu terjadinya konflik, memperbarui fatwa yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan ukhwah islamiyah. Dengan dibuatnya program kerja ini maka akan memudahkan pengurus Majelis Ulama Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Pengurus Majelis Ulama Indonesia memberikan pemahaman atau pembinaan terhadap tokoh-tokoh dari kalangan ustadz atau dari kalangan kiyayi dari setiap penganut paham yang berbeda tentang pentingnya Ukhwah Islamiyah berdasarkan analisis penulis bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia mengadakan suatu pertemuan khusus yang sering disebut dengan forum silaturahmi yang mengundang para mubaligh, ustadz, kiyayi dan para tokoh ormas Islam yang tujuannya adalah untuk berdialog dan berdiskusi tentang pentingnya rasa saling bertoleransi terhadap sesama muslim yang disebut dengan ukhwah Islamiyah, karena dengan demikian diharapkan nantinya agar para tokoh ormas Islam ini bisa memberikan pemahaman terhadap kelompoknya masing-masing dan juga memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pentingnya bertoleransi antar sesama umat Islam yang memiliki perbedaan paham keagamaan tersebut.

Dalam melakukan upaya untuk mengatasi masalah perbedaan paham keagamaan yang terjadi dimasyarakat, Majelis Ulama Indonesia juga memberikan informasi kepada masyarakat melauli media cetak seperti buletin, namun menurut analisis penulis hal ini mengalami sedikit kendala pada anggaran pendanaan namun meskipun demikian hal itu tidak menjadikan sebuah rintangan bagi pihak Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan penyebaran informasi melaului buletin, karna pihak Majelis Ulama Indonesia yang berada di daerah masih menerima kiriman buletin dari Majelis Ulama Pusat yang bisa dijadikan bahan informasi bagi masyarakat.

Pengurus bermitra dengan masyarakat dalam mengantisipasi konflik yang terjadi karena perbedaan paham keagamaan yang terjadi dimasyarakat, menurut analisis penulis hal ini dilakukan agar terciptanya hubungan komunikasi dengan masyarakat, agarantisipasi terjadinya konflik dimasyarakat bisa teratasi dengan adanya kerjasama dengan pihak Majelis Ulama Indonesia, jadi setiap kejadian atau kasus yang terjadi dimasyarakat yang disebabkan karena perbedaan paham keagamaan dikalangan masyarakat, maka masyarakat langsung melaporkannya kepada pihak Majelis Ulama Indonesia agar dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau berdiskusi serta mendudukan maslah dan mencari jalan keluarnya agar tidak menjadi konflik dimasyarakat.

Upaya pengawasan juga dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia pada setiap kegiatan atau pengajian yang akan memicu terjadinya konflik dikalangan masyarakat, menurut hemat penulis Majelis Ulama Indonesia melakukan pengawasan terhadap majelis-majelis ilmu atau holaqoh-holaqoh dan pengajian

sehingga dari pengamatan yang dilakukan dengan melakukan pengawasan bisa menyimpulkan apakah pengajian tersebut membuat resah masyarakat atau tidak, bila meresahkan masyarakat maka pihak Majelis Ulama Indonesia mengadakan pertemuan dan berdialog namun bila terdapat penyimpangan dari syari'at maka pihak Majelis Ulama Indonesia akan melaporkannya pada pihak yang berwajib.

Menurut hemat penulis bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan bimbingan terhadap kelompok masyarakat, ormas ataupun individu dalam menyelesaikan masalah keagamaan meliputi masalah aqidah atau ritual keagamaan maka pihak Majelis Ulama Indonesia menghadirkan pakar atau para ahli dalam bidang tersebut sebelum memutuskan perkara tersebut, setelah diteliti barulah bisa diambil sebuah keputusan bahwa apakah kelompok tersebut perlu dibimbing atau tidak, dan untuk masalah ini tidak ada paksaan dari pihak Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan bimbingan, bila kelompok tersebut bersedia untuk diberi bimbingan maka akan dibimbing dan bila tidak bersedia maka tidak diberikan bimbingan, karna ada sebagian kelompok masyarakat yang memang mereka tidak sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia. Namun hal ini juga melalui pertimbangan dari pihak Majelis Ulama Indonesia, bila kelompok tersebut belum keluar atau melenceng dari syari'at maka pihak Majelis Ulama Indonesia akan membiarkan, namun bila telah melenceng dari syari'at maka pihak Majelis Ulama Indonesia akan melaporkannya pada pihak yang berwajib.

**B. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam Mengatasi Perbedaan Paham keagamaan.**

Upaya dalam mengatasi perbedaan paham keagamaan tentu ada faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat kelancaran dalam upaya mengatasi masalah yang muncul yang diakibatkan oleh perbedaan paham tersebut, adapun yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan upaya tersebut adalah:

1. Memiliki koordinasi yang bagus.
2. Sarana dan prasarana yang memadai.
3. Karena Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang resmi maka ia sangat kuat untuk memberi bimbingan.
4. Untuk kepengurusannya terdiri dari berbagai ormas Islam yang ada di dalamnya.
5. Organisasi Majelis Ulama Indonesia berada dalam naungan pemerintah, dan mendapat bantuan yang sifatnya tidak mengikat.

Disamping adanya faktor pendukung, tentunya ada faktor penghambat dalam melakukan upaya mengatasi perbedaan paham keagamaan yaitu:

1. Kurangnya waktu dan tenaga pengurus.
2. Sulit dalam masalah pengkaderan pengurus karena kualitas SDM yang kurang berkompeten.
3. Struktur organisasinya yang terlalu banyak anggota kepengurusannya, maka hal itu menjadikan lambat dalam bergerak.
4. Karena di kalangan masyarakat banyak terdapat ormas-ormas islam, maka ada sebagian dari ormas tersebut yang mengabaikan fatwa yang di putuskan oleh pihan Majelis Ulama Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah penulis lakukan seperti yang dipaparkan pada bab III dan IV adalah sebagai berikut:

1. Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam mengatasi perbedaan paham keagamaan telah dilakukan dengan baik, dan penulis dapat menyimpulkan bahwa, masyarakat dapat menerima himbauan dari Majelis Ulama Indonesia melalui lembaga dakwah dan ormas Islam, pertemuan-pertemuan untuk berdiskusi, berdialog secara langsung dengan masyarakat, mengadakan forum silaturahmi dengan para mubalig, ustadz, kiyayi, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh ormas Islam, menggunakan buletin sebagai alat bantu komunikasi, bermitra dengan masyarakat, menerima laporan tentang munculnya kelompok yang meresahkan masyarakat, dan Majelis Ulama Indonesia melakukan pengawasan terhadap pengajian-pengajian yang ada, serta melaporkan kepada pihak yang berwajib bila memang terdapat kelompok tertentu yang telah menyimpang dari syari'at Islam.
2. Faktor-faktor pendukung Majelis Ulama Indonesia adalah: koordinasi yang bagus, Sarana dan prasarana yang memadai, terdiri dari berbagai ormas Islam, dan berada dalam naungan pemerintah. Dan sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah: kurangnya waktu pengurus,

kualitas SDM yang kurang berkompeten, terlalu banyak anggota kepengurusannya, sebagian masyarakat tidak mau mendengarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang penulis berikan kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Kepada pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau seharusnya memiliki waktu yang dikhususkan untuk MUI, walaupun menjadi pengurus bukanlah suatu tugas pokok, namun meluangkan waktu yang dikhususkan adalah lebih baik demi untuk menyelesaikan masalah-masalah perbedaan paham keagamaan khususnya dan masalah-masalah umat Islam pada umumnya.
2. Kepada pemerintah hendaklah memberikan dukungan yang lebih kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau terutama dalam anggaran untuk melaksanakan program kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau.
3. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau harus memiliki lebih banyak lagi SDM yang berkompeten yang berlatarbelakang para ulama.
4. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam personalia pengurusannya harus dikerutkan lagi, sehingga tidak terlalu banyak jumlah anggota dalam kepengurusan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Sirajuddin, *I'tiqad Ahlussunah Wal Jamaah*, Pustaka Tarbiyah Baru, 2008. Jakarta
- Abdullah Muhaamd Husain, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, Pustaka Thariquh Izzah, 2011. Jakarta
- Amin Samsul Munir, *Ilmu Dakwah*, Amzah, 2009. Jakarta
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, PT Rineka Cipta, 2010. Jakarta
- 'Azhim Sa'id Abdul, *Menyiasati Perselisihan Perbedaan Pendapat*, Pustaka Setia, 2007. Bandung
- \_\_\_\_\_, *Ukhwah Imaniyah*, Qisthi Press, 2005. Jakarta
- Dokumentasi Kongres Umat Islam Indonesia IV, *Ukhwah Islamiyah Untuk Indonesia yang Bermartabat*, Badan Pekerja Kongres Umat Islam Indonesia IV, 2005. Jakarta
- Hartono Toni, dkk, *Kominikasi Dakwah*, Yayasan Pustaka Riau, 2011. Pekanbaru
- Hilal Iyad, *Studi Tentang Ushul Fiqih*, Pustaka Thariquh Izzah, 2007. Jakarta
- Idahram Syaikh, *Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi*, Lkis Printing Cemerlang, 2011. Yogyakarta
- Jalaludin, *Psikologi Agama (Memahami prilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi)*, Raja Grafindo Persada, 2007. Jakarta
- Muhaimin Yahya A, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005. Jakarta
- Nasir, Sahilun A. *Pemikiran Kalam (Teologi Islam)*, Rajawali Pers, 2010. Jakarta
- Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011. Jakarta
- Rasyid, H.M. Hamdan, *Bimbingan Ulama (Kepada Umara dan Umat)*, Pustaka Beta, 2007. Jakarta

Sam, H.M. Ichwan, *35 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Komisi Informasi dan Komunikasi, 2010. Jakarta

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, 2011. Bandung

Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi dan Penelitian)*, Salemba Humanika, 2010. Jakarta